

PENGARUH PDRB DAN UKURAN TERHADAP *INTERNAL CONTROL* PEMERINTAH DAERAH DENGAN PAD SEBAGAI INTERVENING

Prima Utama Wardoyo Putro

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun, Jawa Timur

E-mail: primautama28@gmail.com

Abstract

Law No 32 year on 2004 about Regional Government and Law No 33 years on 2004 about Fiscal Balance between the Central Government and Regional Government are a new regulation relating to the implementation of regional autonomy in Indonesia. Giving the authority to manage its own region required an internal control system that can monitor of all by central government. The problem in this study is: Is there are any influence between growth, size, and PAD through Regional Government Internal Controls weakness with PAD as an intervening variable. The research populations are the financial statements and reports on the results of the entire province in Indonesia totaling 33 provinces. Source of data which are used are secondary data, and data collection by using the documentation method. The results of partial testing showed that PAD and Growth have significant affects to the Internal Controls, whereas size has not significant effect. Simultaneous testing showed a significant effect between the independent and dependent variables. The test results path testing showed that growth has no significant effect to internal control through PAD as an intervening variable and size has a significant effect to internal control variable through PAD as an intervening variable. The results of determinant coefficient by simultan test amount 28.7%. Its mean that Internal Control can be explained by Growth, Size and PAD, the remaining 71.3% influenced by factors other than study.

Keyword: *Internal Control, Size, Growth, and Income*

PENDAHULUAN

Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 banyak mengakibatkan berbagai perubahan di Indonesia, diantaranya adalah perubahan pada sistem pemerintahan. Pasca terjadinya reformasi banyak perubahan yang ada dalam sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang pada awalnya sentralisasi atau terpusat berubah menjadi desentralisasi. Perubahan sistem ini ditandai dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Regulasi tersebut menjadi landasan bagi pemberian otonomi daerah yang semakin besar kepada daerah. Sistem otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia telah memberikan perubahan yang signifikan terhadap peran daerah dalam mengelola daerahnya. Penyelenggaraan otonomi daerah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Banyaknya pemerintahan daerah di Indonesia dengan otonomi yang semakin besar, membuat pengawasan yang baik sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kecurangan (*fraud*). Kecurangan yang terjadi dalam sebuah organisasi baik organisasi sektor publik maupun sektor swasta biasanya disebabkan oleh lemahnya pengendalian intern. Berdasarkan *KPMG Fraud Survey 2006* yang dilakukan di Carolina Amerika Serikat ditemukan bahwa lemahnya pengendalian intern menjadi faktor utama penyebab terjadinya kecurangan yaitu sebesar 33% dari total kasus kecurangan yang terjadi. Faktor kedua adalah diabaikannya sistem pengendalian intern yang telah ada sebesar 24%. Berdasarkan dua faktor tersebut terlihat bahwa keberadaan dan pelak-sanaan pengendalian intern sangatlah penting.

Badan Pengawas Keuangan (BPK) sebagai lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengawasi dan mengaudit lembaga pemerintah memiliki tugas untuk mengawasi jalannya sistem pengendalian intern dalam organisasi pemerintah. Kelemahan pengendalian intern dinilai BPK melalui tiga aspek, yaitu: kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan APBD kelemahan struktur pengendalian intern, dan kelemahan struktur pengendalian intern.

Pertumbuhan daerah ikut berpengaruh terhadap pengendalian intern pemerintah. Argumen ini didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah daerah yang sedang mengalami pertumbuhan atau tingkat pertumbuhannya tinggi lebih rentan menghadapi masalah pengendalian intern. Fakta ini dibuktikan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Petrovits, Shakespeare, dan Shih (2010). Ukuran pemerintah daerah (*size*) dan jumlah pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah ikut serta berpengaruh terhadap masalah pengendalian intern. Ukuran pemerintah diukur dari aset yang dimiliki daerah. Banyaknya aset yang ada dalam sebuah organisasi akan berpengaruh terhadap pengendalian intern. Ibarat sebuah perusahaan yang memiliki aset dalam jumlah yang besar, maka pihak manajemen akan mengerahkan sumber daya yang ada dalam perusahaan untuk melindungi aset yang dimilikinya dari kemungkinan kecurangan yang akan terjadi. Begitu juga dengan pemerintah, harus mampu mengelola aset yang dimilikinya secara baik, karena pada hakekatnya aset yang dimiliki oleh pemerintah adalah milik rakyat yang harus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Penerimaan daerah atau Pendapatan Asli daerah juga ikut berpengaruh terhadap masalah pengendalian intern. Semakin banyaknya pos penerimaan daerah akan membuat masalah pengendalian intern meningkat. Pendapatan daerah yang diterima oleh daerah sebenarnya tidak memiliki jumlah yang terlalu besar akan tetapi intensitasnya yang tinggi membuat jumlahnya besar, seperti pajak daerah dan retribusi daerah. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui peran PDRB dan ukuran (*size*) terhadap kelemahan pengendalian intern Pemda dengan menggunakan PAD sebagai variabel intervening. Penggunaan variabel intervening dimaksudkan untuk mengetahui apakah penggunaan variabel intervening mampu memperkuat pengaruh variabel independen yaitu PDRB dan ukuran terhadap variabel dependen yaitu kelemahan pengendalian intern sehingga dapat diketahui pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsungnya.

KAJIAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Otonomi daerah secara luas berarti pemberian hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan daerahnya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No.32 tahun 2004). Pendelegasian kewenangan tersebut disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dalam rangka desentralisasi fiskal. Pendanaan kewenangan yang diserahkan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri dan mekanisme perimbangan keuangan pusat dan antar daerah. Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah PAD yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pelaksanaan perimbangan sendiri terdiri dari dana bagi hasil, DAU dan DAK (UU No.33 tahun 2004).

Pengendalian Internal

Menurut SA seksi 319 Per-timbangan atau Pengendalian Intern Audit Laporan Keuangan paragraf 06 dalam Mulyadi (2002:180) mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:

1. Keandalan pelaporan keuangan
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
3. Efektifitas dan efisiensi operasi

Pengendalian internal pada sektor swasta pada awalnya lebih menekankan kepada pengendalian akuntansi keuangan. Pengendalian internal dalam sektor publik diperlukan tidak hanya untuk pengendalian akuntansi keuangan, tetapi juga untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengawasi dan mengaudit lembaga pemerintah memiliki tugas untuk mengawasi jalannya sistem pengendalian intern dalam organisasi pemerintah. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK dapat dijadikan indikator untuk menilai sejauh mana pengendalian intern pemda telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kelemahan-kelemahan yang ditemukan oleh audit BPK

dapat menentukan tingkat audit intern. Kelemahan pengendalian intern dinilai BPK melalui tiga aspek, yaitu:

1. Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan
2. Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan APBD Kelemahan Struktur Pengendalian Intern
3. Kelemahan Struktur Pengendalian Intern

Berdasarkan ketiga kriteria tersebut, BPK selaku pengawas organisasi sektor publik mampu menilai apakah organisasi pemerintah tersebut sudah memiliki dan menjalankan sistem pengendalian intern dengan baik dan benar.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Sadono Sukirno (1996:56), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan dalam GDP, tanpa memandang apakah kenaikan tersebut cukup besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan dalam struktur ekonomi berlaku atau tidak. Guna melihat laju pertumbuhan suatu negara dan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat, penambahan pendapatan penting diperhatikan. Pertumbuhan ekonomi dalam arti terbatas yaitu peningkatan produktifitas dan pendapatan, dapat berlangsung tanpa terwujudnya pembangunan. Pertumbuhan ekonomi menurut Boediono diartikan sebagai proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pengertian ini terdapat tiga aspek yang ditekankan yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dan bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa ada aspek dinamis dari suatu perekonomian, yang artinya yaitu suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.

Ukuran (Size)

Menurut Ferry dan Jones dalam Panjaitan 2004, tolok ukur yang bisa dijadikan dasar untuk menunjukkan besar kecilnya perusahaan antara lain: total penjualan, rata-rata tingkat penjualan, dan total aktiva. Perusahaan yang tergolong dalam ukuran besar umumnya memiliki jumlah aset atau total aktiva yang besar pula, sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log *size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Menurut Hadasman Ibrahim ukuran perusahaan dapat dikategorikan dalam tiga kategori yaitu: perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium size*), dan perusahaan kecil (*small size*). Penentuan ukuran perusahaan dapat didasarkan pada total aset yang dimiliki perusahaan (Machfoedz, 1994).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan bagi daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun perlu diingat bahwa upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang: menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas pendidikan, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor impor. Sumber-sumber penting dalam PAD ada empat yaitu terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah).

HIPOTESIS

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan masalah yang telah diungkapkan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. PDRB memiliki pengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.
2. Ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.
3. PAD memiliki pengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.

4. PDRB memiliki pengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah dengan PAD sebagai variabel intervening.
5. Ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah dengan PAD sebagai variabel intervening.
6. PDRB, ukuran, dan PAD secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian in-tern pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dimana data yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk angka, skor, dan analisisnya menggunakan statistik. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan seluruh Provinsi yang ada di Indonesia, laporan PDRB dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pemerintah daerah tahun 2014-2016. Data variabel dependen kelemahan pengendalian intern dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diperoleh dari situs Badan Pemeriksa Keuangan sebagai indikator kelemahan pengendalian intern pemda. Selanjutnya data variabel independen PDRB, Ukuran, dan PAD sebagai variabel intervening adalah laporan neraca Provinsi dan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemda, serta data Produk Domestik Regional Bruto yang diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik tahun 2014-2016. Untuk menjawab permasalahan penelitian, maka digunakan beberapa metode analisis data.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk mengetahui gambaran umum dari semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dengan melihat tabel statistik deskriptif yang menunjukkan hasil pengukuran *mean*, nilai minimal dan maksimal serta standar deviasi semua variabel tersebut.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji penyimpangan asumsi klasik menurut Ghazali (2005) terdiri dari uji normalitas data, uji auto-korelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multi-kolinearitas. Uji normalitas adalah untuk menguji apakah model regresi, variabel independen, dan variabel dependennya memiliki distribusi data normal atau tidak normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dilakukan dengan menguji nilai rasio *skweness* dan rasio *kurtosis*. Apabila nilai rasio *skweness* dan rasio *kuortis* memiliki nilai rasio diantara -2 hingga +2 berarti dapat disimpulkan bahwa distribusi data bersifat normal.

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model dalam model regresi linier ada korelasi antar pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2011). Untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi dapat dilakukan dengan pengujian terhadap nilai uji Durbin-Watson (Uji DW). Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011). Heterokedastisitas berarti penyebaran titik data populasi pada bidang regresi tidak konstan.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas atau independen (Gozhali, 2006). Pendekatan yang digunakan untuk menguji ada tidaknya multikolinieritas dengan uji tes *Variance Inflation Factor* (VIF), dengan analisis sebagai berikut:

- a. Jika nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinieritas pada penelitian tersebut.
- b. Jika nilai *tolerance* < 0,10 dan VIF > 10, maka dapat diartikan bahwa terdapat multikolinieritas pada penelitian tersebut.

3. Analisis Regresi

Salah satu teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi berganda. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{PI} = \alpha + \beta_1 X1 + \beta_2 X2 + \beta_3 X3 + e$$

4. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Menurut Ghozali (2011) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pada uji statistik t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel, Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut jika t hitung > t tabel atau probabilitas < tingkat signifikansi (Sig < 0,05), maka H_a diterima dan H_o ditolak, variabel independen ber-pengaruh terhadap variabel dependen. Bila t hitung < t tabel atau probabilitas > tingkat signifikansi (Sig > 0,05), maka H_a ditolak dan H_o diterima, variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

5. Uji F (Uji Simultan)

Uji statistik F menunjukkan apakah variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel de-pendennya. Untuk menentukan nilai F tabel, tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) $df = (n-k)$ dan $(k-1)$ dimana n adalah jumlah sampel.

6. Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Analisis jalur digunakan untuk menguji pengaruh variabel intervening yang digunakan dalam model penelitian. Variabel intervening yang digunakan dalam penelitian ini adalah PAD. Model analisis jalur yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y_{PAD} = \alpha + \beta_1 X1 + \beta_2 X2 + e1 \dots (1)$$

$$Y_{PI} = \alpha + \beta_1 Y_{PAD} + e2 \dots (2)$$

$$Y_{PI} = \alpha + \beta_1 X1 + \beta_2 X2 + Y_{PI} + e3 (3)$$

HASIL PENELITIAN

1. Deskriptif Penelitian

Melalui analisis deskriptif yang telah dilakukan pada variabel penelitian, maka didapatkan hasil sebagai berikut ini:

Tabel 1 Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PI	99	36	424	139.27	78.796
PDRB	99	4.E12	9.E14	1.39E14	2.052E14
ASET	99	5.E11	4.E14	2.07E13	6.758E13
PAD	99	3.E10	1.E13	1.26E12	2.112E12
Valid N (listwise)	99				

2. Uji Asumsi Klasik

Hal pertama yang dilakukan dalam uji asumsi klasik adalah uji normalitas. Uji Normalitas dimaksudkan untuk menentukan apakah variabel-variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan hasil olah data dapat diketahui rasio *skewness* = $0,758 : 0,243 = 0,311$. Sedangkan nilai rasio *kuortis* = $-0,154 : 0,481 = -0,320$. Karena rasio *skewness* dan rasio *kuortis* berada diantara -2 hingga +2, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data adalah normal. Uji selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji Multikolineritas terhadap variabel independen yaitu PDRB, ASET, dan PAD mempunyai nilai VIF dibawah angka 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 5% ($\alpha = 0,05$). Hal ini berarti bahwa regresi yang dipakai untuk ketiga variabel independen diatas tidak terdapat masalah multikolineritas.

Uji selanjutnya adalah auto-korelasi. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai Durbin Watson (*d*) adalah 1,746 dengan jumlah unit analisis (N) 99 dan jumlah variabel bebas (k) 3 sedangkan nilai *dl* 1,613 dan nilai *du* 1,736. Berdasarkan data tersebut maka memenuhi kriteria $du < d < 4-du$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil pengolahan data dalam penelitian ini terbebas dari masalah autokorelasi. Uji selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil pengolahan data dapat diketahui bahwa nilai sig memiliki nilai diatas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi

Metode regresi digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian. Metode regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda. Hasil uji regresi ditampilkan pada tabel 2 yang memiliki makna sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 119,219 artinya apabila nilai variabel pertumbuhan, ukuran, dan PAD bernilai 0, maka jumlah kasus terkait kelemahan pengendalian intern semakin bertambah atau meningkat.
2. Variabel PDRB menunjukkan adanya pengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern dan memiliki pola positif yang bermakna semakin bertambah nilai PDRB maka semakin tinggi pula jumlah kasus terkait kelemahan pengendalian intern. PDRB berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern dengan nilai koefisien sebesar 4,872 artinya setiap penambahan 1 Rupiah variabel PDRB akan menaikkan masalah pengendalian intern sebesar 4,872 kasus.
3. Variabel ukuran tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap masalah pengendalian intern karena memiliki nilai signifikansi diatas α .
4. Variabel PAD menunjukkan tidak adanya pengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern akan tetapi adanya pengaruh negative. PAD berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern dengan nilai koefisien -3,704 artinya setiap penambahan 1 Rupiah variabel PAD akan menurunkan pengendalian intern sebesar -3,704.

**Tabel 2. Hasil Uji Analisis Regresi
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	119.219	8.096		14.725	.000
PDRB	4.872E-13	.000	1.269	6.324	.000
ASET	-1.132E-15	.000	-.110	-1.240	.218
PAD	-3.704E-11	.000	-.993	-5.035	.000

a. Dependent Variable: PI

4. Uji Parsial (Uji Statistik T)

Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Hasil pengujian parsial didapat hasil sebagai berikut:

- Hasil Uji T untuk H_1 diperoleh hasil T-hitung 6,324 dengan signifikansi 0,000. Nilai signifikansi untuk variabel PDRB menunjukkan nilai dibawah signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai T-hitung $6,324 > T$ -tabel sebesar 1,9845 yang artinya bahwa H_1 diterima sehingga ada pengaruh yang signifikan PDRB terhadap kelemahan pengendalian intern.
- Hasil Uji T untuk H_2 diperoleh hasil T-hitung -1,240 dengan signifikansi 0,218. Nilai signifikansi untuk variabel aset menunjukkan nilai diatas signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai T-hitung $-1,240 < T$ -tabel sebesar 1,9845 yang artinya bahwa H_2 diterima sehingga tidak ada pengaruh yang signifikan aset terhadap kelemahan pengendalian intern.
- Hasil Uji T untuk H_3 diperoleh hasil T-hitung -5,035 dengan signifikansi 0,000. Nilai signifikansi untuk variabel PAD menunjukkan nilai dibawah signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan T-hitung -5,035 tanpa tanda negatif nilai T-hitung $5,035 > T$ -tabel sebesar 1,9845 yang artinya bahwa H_3 ditolak sehingga dapat disimpulkan tidak ada pengaruh positif variabel PAD terhadap kelemahan pengendalian intern.

5. Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji Simultan digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil Uji Pengaruh Simultan (Uji Statistik F) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Simultan

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	188043.525	3	62681.175	14.164	.000 ^a
Residual	420418.111	95	4425.454		
Total	608461.636	98			

a. Predictors: (Constant), PAD, ASET, PDRB

b. Dependent Variable: PI

Hasil Uji statistik F pada tabel diatas menguji pengaruh pertumbuhan, ukuran, dan PAD yang memiliki F-hitung 14,164 dengan nilai signifikansi 0,000. Hal ini berarti tingkat signifikansi < 5% ($\alpha = 0,05$) dan F-hitung sebesar 14,156 > F-tabel 1,9845 yang artinya H4 diterima maka dapat disimpulkan bahwa PDRB, ukuran, dan PAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern.

6. Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Analisis jalur digunakan untuk menguji pengaruh mediasi dari suatu model penelitian melalui variabel intervening. Variabel intervening dalam penelitian ini adalah PAD. Berikut adalah hasil uji jalur:

Tabel 4. Hasil Analisis Jalur R Square Regresi 1

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.902 ^a	.813	.809	9.228E11

a. Predictors: (Constant), ASET, PDRB

Tabel 5 Hasil Analisis Jalur Coefficients Regresi 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-3.190E10	1.123E11		-.284	.777
PDRB	.009	.000	.915	20.175	.000
ASET	-1.940E-5	.000	-.070	-1.551	.124

a. Dependent Variable: PAD

Tabel 6. Hasil Analisis Jalur R Square Regresi 2 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.556 ^a	.309	.287	66.524

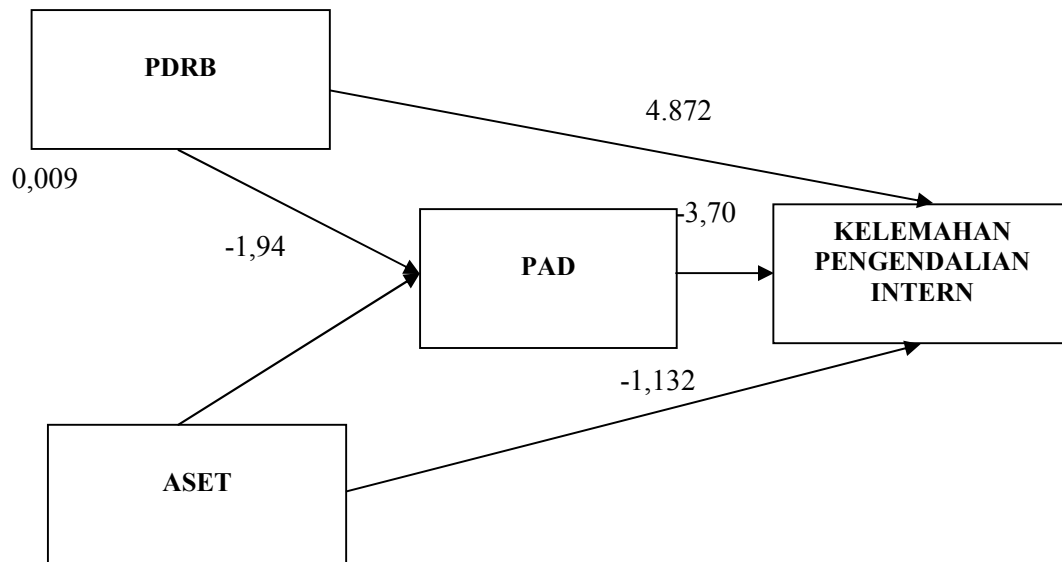
a. Predictors: (Constant), PAD, ASET, PDRB

Tabel 7. Hasil Analisis Jalur Coefficients Regresi 2

Coefficients^a

Mode l	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	119.219	8.096		14.725	.000
PDRB	4.872E-13	.000	1.269	6.324	.000
ASET	-1.132E-15	.000	-.110	-1.240	.218
PAD	-3.704E-11	.000	-.993	-5.035	.000

a. Dependent Variable: PI



Gambar 1. Hasil Uji Path

PEMBAHASAN

1. Pengaruh PDRB terhadap Pengendalian Intern

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern. Nilai T-hitung untuk PDRB sebesar 6,324 lebih besar dari nilai T-tabel sebesar 1,9845 dan memiliki nilai signifikansi 0,000. Hal ini berarti hipotesis pertama diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Doyle, Ge, dan McVay (2007), Asbaugh-Skife, Collins, dan Kinney (2007), dan Petrovits, Shakespeare, dan Shih (2010), serta Dwi Martani (2011) yang menyimpulkan bahwa aktivitas eko-nomi berhubungan positif dengan masalah pengendalian intern. Aktivitas bisnis yang cepat dari sebuah organisasi menyebabkan banyak terjadi perubahan sehingga memungkinkan terjadinya masalah pengendalian intern.

2. Pengaruh Ukuran terhadap Pengendalian Intern

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern. Nilai T-hitung untuk aset adalah -1,240. Tanpa tanda negatif nilai T-hitung sebesar 1,240 lebih kecil dari T-tabel sebesar 1,9845 dan memiliki nilai signifikansi 0,218. Hal ini berarti hipotesis kedua diterima yaitu ukuran tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ge dan McVay (2005), Doyle, Ge, dan McVay (2007), dan Dwi Martani (2011). Suatu organisasi atau perusahaan yang memiliki jumlah aset yang besar akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk melakukan pengendalian guna menjaga aset yang dimilikinya. Perusahaan atau organisasi yang besar cenderung mampu, baik dari segi sumber daya maupun finansial untuk membuat sebuah sistem pengendalian intern yang baik jika dibandingkan dengan perusahaan atau organisasi yang memiliki ukuran yang relatif lebih kecil.

3. Pengaruh PAD terhadap Pengendalian Intern

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah PAD berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern. Nilai T-hitung untuk PAD sebesar -5,035. Tanpa tanda negatif nilai T-hitung 5,035 lebih besar dari T-tabel sebesar 1,9845 dan memiliki nilai signifikansi 0,000. Hal ini berarti hipotesis ketiga ditolak yaitu PAD tidak berpengaruh positif terhadap pengendalian intern pada level signifikansi 95%. Hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Petrovits, Shakespeare, dan Shih (2010) yang menyimpulkan bahwa sumber pendapatan dalam organisasi membuat masalah pengendalian intern meningkat. Pendapatan Asli Daerah diantaranya berasal dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan alam, dan pajak daerah. Nilai dari setiap satu sumber PAD biasanya tidak terlalu besar namun total dari jumlah PAD memiliki jumlah yang banyak, hal ini dikarenakan banyaknya pos-pos penerimaan daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mampu menjalankan sistem pengendalian terhadap pendapatan daerah yang memiliki banyak pos-pos penerimaan dengan baik.

4. Pengaruh PDRB terhadap Pengendalian Intern dengan PAD sebagai variabel Intervening

Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap pengendalian intern dengan PAD sebagai variabel intervening. Nilai pengaruh langsung PDRB terhadap pengendalian intern sebesar 4,872 sedangkan nilai mediasi atau pengaruh PDRB terhadap pengendalian intern melalui PAD sebesar -0,033. Berdasarkan perhitungan tersebut nilai pengaruh langsung lebih besar jika dibandingkan dengan nilai mediasi atau tidak langsung, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis lima ditolak karena tidak ada pengaruh PDRB terhadap pengendalian intern dengan PAD sebagai

5. Pengaruh Ukuran terhadap Pengendalian Intern dengan PAD sebagai variabel Intervening

Hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah ukuran berpengaruh secara signifikan terhadap pengendalian intern dengan PAD sebagai variabel intervening. Nilai pengaruh langsung ukuran terhadap pengendalian intern sebesar -1,132 sedangkan nilai mediasi atau pengaruh ukuran terhadap pengendalian intern melalui PAD sebesar 7,185. Berdasarkan perhitungan tersebut nilai pengaruh langsung lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai mediasi atau tidak langsung, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis enam diterima karena terdapat pengaruh ukuran terhadap pengendalian intern dengan PAD sebagai variabel mediasi.

Pengaruh ukuran yang dihitung berdasarkan nilai aset tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengendalian intern. Pemasukan daerah yang diwakili oleh Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor yang ikut berpengaruh terhadap masalah pengendalian intern pemerintah daerah. Melalui perhitungan dapat diketahui bahwa ukuran pemda mampu meningkatkan nilai pendapatan daerah yang kemudian juga berdampak terhadap kelemahan pengendalian intern pemda.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pada hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Secara parsial dapat diambil kesimpulan bahwa PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Doyle, Ge, dan McVay (2007), Ashbaughskife.
2. Secara parsial dapat diambil kesimpulan bahwa ukuran yang diukur melalui total aset tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ge, dan McVay (2005) dan Doyle.
3. Secara parsial dapat diambil kesimpulan bahwa PAD tidak berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern. Hal ini berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi martini, Fazri Zaelani (2011).
4. Melalui uji jalur (*path*) dapat diambil kesimpulan bahwa variabel PDRB tidak mampu memberikan pengaruh terhadap variabel PAD secara signifikan sebagai variabel intervening, sehingga pengaruh PAD terhadap variabel kelemahan pengendalian intern tidak signifikan.
5. Melalui uji jalur (*path*) dapat diambil kesimpulan bahwa ukuran mampu memberikan pengaruh terhadap variabel intervening PAD secara signifikan. Pengaruh tersebut mengakibatkan meningkatnya jumlah PAD yang ikut berpengaruh terhadap variabel kelemahan pengendalian intern, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa PAD sebagai variabel intervening diterima.
6. Secara simultan dapat diambil kesimpulan bahwa PDRB, ukuran dan PAD berpengaruh secara signifikan terhadap variable kelemahan pengendalian intern. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dwi Martini (2011).

Saran

1. Angka PDRB berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap aktivitas ekonomi yang terjadi di wilayahnya untuk menekan kelemahan pengendalian yang diakibatkan oleh tingginya angka PDRB.
2. Aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah telah mampu mengelola aset daerahnya dengan baik sehingga tingkat kecurangan dalam penggunaan aset dapat diminimalisir. Akan tetapi pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan terhadap aset pemerintah agar nilai kecurangan terhadap aset dapat ditekan.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern. Hal ini berarti semakin tinggi nilai PAD maka tingkat kelemahan terhadap pengendalian intern akan semakin menurun. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah telah mampu meningkatkan pengawasan terhadap penerimaan daerah, akan tetapi pemerintah diharapkan mampu meningkatkan pengawasan terhadap penerimaan daerah yang memiliki banyak pos-pos penerimaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Syaiful. 2012. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Alokasi Belanja Modal*. Skripsi Sarjana. FE UNNES. Semarang
- Akai Nobua, Nishimura, Yukihiko, Sakata Masayo. 2007. *Complementary, Fiscal Decentralization and Economic Growth*. Japan

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II tahun 2014-2016*. <http://www.bpk.go.id>
- Badan Pusat Statistik. Pengertian dan Indikator Produk Domestik Regional Bruto. <http://www.bps.go.id>
- Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE
- Data PDRB Provinsi di Indonesia Tahun 2008-2010. <http://www.bps.go.id>
- Data Total Aset Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2016. <http://www.djpk.go.id>
- Darwanto dan Yulia. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi X Makasar
- Doyle, J., Ge, Weili, McVay, S. 2007. *Determinant of Weaknesses in Internal Control Over Financial Reporting*. Journal of Accounting and Economics, 44, 193-223.
- Ge, W., McVay, S. 2005. *The Disclosure of Material Weaknesses in Internal Control After the Sarbanes-Oxley Act*. Accounting Horizon, 19 (3), 137-158.
- Ghozali, Imam. 2011. *Analisis Multivariate Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hidayat, Afri. 2009. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Posisi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatra Utara*. Skripsi Sarjana FE Universitas Sumatra Utara
- Indah, Nur. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah*. Skripsi Sarjana FE UNDIP. Semarang
- Indriantoro, Nur. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE
- Irawan, Irwan. *Stakeholder Teory*. <http://www.irwanirawan.com>
- Kamaludin. 2009. *Pengaruh Aset Total, Dana Pihak Ketiga, Pendapatan Non-Bunga, dan Ekuitas terhadap Laba Bersih (Studi Kasus pada Bank Bengkulu)*. Tesis Universitas Bengkulu
- Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 Tentang *Good Governance*
- Maharani, Mayzestika. 2010. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal*. Skripsi Sarjana. FE UNNES. Semarang
- Machfoed, Mas'ud. 1994. *Financial Ratio Analysis and The Prediction of Earning Changes in Indonesia*. Kelola. Vol 3, No. 7
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Martani, Dwi. 2011. *Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, dan Kompleksitas terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Studi Kasus di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011.
- Mulyadi. 2001. *Auditing*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Panjaitan, Yunia. 2004. *Analisis Harga Saham, Ukuran Perusahaan, dan Resiko terhadap Return yang Diharapkan Investor pada Perusahaan Saham Aktif*. Balance vol 1
- Petrovits, Christine, Shakespeare, Chaterine, dan Shih, Ameer. 2010. *The Causes and Consequences of Internal Control Problems in Nonprofit Organizations*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang *Simtem Pengendalian Intern Pemerintah*
- Raharjo, Eko. 2012. *Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi*. STIE Pelita Nusantara Semarang
- Sukirno, Sadono. 1996. *Ekonomi Makro*. Jakarta
- Subiyanto, Ibnu. 2000. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Tentang *Pengelolaan Kekayaan Alam*
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang *Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang *Pajak Daerah*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang *Perbendaharaan Negara*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah*